



Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Aceh Tahun 2016 - 2020

¹Venni Jelita, ²Jen Surya ³Khairuna

1)2)3)Program Studi Ekonomi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah

vennijelita@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana umum dan dana khusus terhadap investasi di Provinsi Aceh tahun 2016-2020, baik secara simultan maupun parsial. Subyek penelitian ini adalah data sekunder yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dari tahun 2016 hingga tahun 2020. berupa Laporan Data Keuangan (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) anggaran belanja daerah tahun anggaran. Informasi ini dari situs resmi Kementerian. Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> dan dianalisis secara kuantitatif. Analisis data untuk melihat pengaruh variabel terikat dan variabel bebas menggunakan analisis persamaan regresi berganda. Pengujian hipotesis dengan uji statistik t-test menggunakan program komputer SPSS V.22 For Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan dana iuran khusus berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap investasi di Provinsi Aceh dari tahun 2016 hingga 2020.

Kata kunci : *Belanja modal; Dana alokasi khusus; Dana alokasi umum.*

PENDAHULUAN

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan guna membiayai pengeluaran yang direncanakan, serta pengeluaran rutin dan pembangunan. Mewujudkan pendapatan dan biaya daerah memerlukan perencanaan yang baik. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan daerah, dana perimbangan, dan pendapatan perundang-undangan lainnya. Pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang diterima dan diperoleh dari daerah yang bersangkutan, dan dari pajak daerah serta dari pengelolaan kekayaan daerah atau sumber daya alam dan pendapatan lain yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pengeluaran pajak bumi dan bangunan bagian daerah, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, serta dana distribusi umum (DAU) dan dana khusus. Penyaluran Dana (DAK).

Biaya regional meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Belanja daerah merupakan alokasi sumber daya yang harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, dan belanja daerah dapat menjadi ukuran keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah provinsi mengalokasikan dana dalam APBD berupa anggaran investasi untuk peningkatan aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang pendapatannya melebihi satu tahun dan menambah kekayaan atau kekayaan negara, yang pada gilirannya meningkatkan anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan normal (Permendagri No. 77, 2020). Pemerintah kota harus dapat mengalokasikan anggaran investasi dengan tepat, karena investasi merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan publik sehubungan dengan desentralisasi



fiskal. Investasi memegang peranan penting karena memiliki umur yang panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembagian investasi ini didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan kebutuhan fasilitas umum. Tujuan investasi adalah akuisisi aset tetap kotamadya, mis. peralatan, gedung, prasarana dan aset tetap lainnya (Halim, 2018:101).

Belanja daerah merupakan perkiraan beban belanja daerah yang didistribusikan secara adil dan merata sehingga dapat dinikmati secara relatif merata oleh semua golongan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun faktanya, ketika pemerintah daerah mendistribusikan pendapatan daerah, mereka cenderung digunakan untuk belanja rutin daripada belanja modal. Hal ini terlihat pada strategi pemerintah Aceh 2016-2020. dari laporan pelaksanaan anggaran tahunan (LRA). Fungsi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah daerah adalah fungsi belanja uang daerah yang rutin untuk membiayai kegiatan operasional negara. Untuk membiayai biaya tersebut, diperlukan sumber pendapatan dari daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah (DPKA, 2020).

Pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah provinsi, khususnya pemerintah kabupaten/kota, dan menyerahkan keuangan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan kepegawaian. Transfer dana tersebut dilakukan dalam bentuk dana perimbangan, yaitu Dana Umum Untuk Pertumbuhan (DAU) dan Dana Khusus (DAK). Berdasarkan UU no. 23 Pada tahun 2018, dana alokasi khusus adalah sumber daya dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan urusan pemerintahan daerah.

DAU adalah dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan perekonomian daerah. Penggunaan dana tersebut akan tersedia bagi daerah sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan peningkatan pelayanan sosial sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun penggunaan DAK ditujukan untuk kegiatan penanaman modal untuk pembangunan, perolehan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang berumur ekonomis, termasuk penyediaan jasa penunjang fisik dan tidak termasuk penyertaan modal. di tahun. Selain itu, volume investasinya juga cukup besar. Besarnya belanja modal daerah tidak dapat menutupi pendapatan asli daerah, baik dari pajak maupun bukan pajak, pada umumnya Provinsi Aceh masih menunggu transfer dana lain seperti alokasi umum dan dana khusus dari pemerintah pusat.

Realitas yang ada di Provinsi Aceh saat ini adalah tanpa adanya transfer dana seperti Dana Distribusi Umum dari pusat, dipastikan belanja modal Provinsi Aceh akan berkurang, yang akan berdampak langsung pada keterlambatan program yang direncanakan dan penundaan. dalam program pembangunan juga akan tetap ada. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 oleh Dirjen PAD, Kenaikan Umum, Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pemerintah Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah Provinsi Aceh Periode 2017-2020
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Pendapatan Asil Daerah	1,023,803,-	1,263,896,-	2,034,885,-	2,698,912,-



2.	Dana Alokasi Umum	1.930.152,-	1.201.613,-	2.126.193,-	2.126.193,-
3.	Dana Alokasi Khusus	1.560.836,-	72.954,-	1.826.272,-	1.657.078,-
4.	Belanja Modal	2.529.205,-	2.967.172,-	3.621.219,-	2.725.627,-

Sumber: DJPK, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PAD Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Juga, jika melihat dana alokasi umum, dana khusus, dan belanja modal, kita melihat berbagai hal yang kadang naik, kadang turun. Namun, belanja modal provinsi Aceh relatif besar dan cenderung meningkat, tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun belanja modal provinsi Aceh selalu lebih tinggi dari PAD, hal ini benar terjadi, karena jika investasi tidak mencukupi, maka program yang dilaksanakan adalah yang direncanakan, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Perimbangan Keuangan, 2021). Fakta dan fenomena di atas semakin menarik untuk ditelaah lebih dalam, mengingat PAD Provinsi Aceh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tetapi investasi daerah juga tumbuh lebih banyak setiap tahun. Peneliti disini tertarik, karena saat ini Provinsi Aceh masih menghadapi kesulitan dalam alokasi investasi, dimana pendapatan tersebut selalu digunakan hanya untuk alokasi pengeluaran rutin, seperti biaya pribadi dan pengeluaran barang dan jasa yang diperoleh. Transfer dana terpusat.

Dana transfer terpusat ini merupakan salah satu aspek terpenting dari APBD, karena penggunaan dana tersebut harus diarahkan pada pengembangan, perolehan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik permanen, termasuk penyediaannya, untuk kegiatan penanaman modal. mendukung fasilitas fisik tetapi bukan kontribusi modal. Pemisahan dana investasi dan dana kerjasama khusus diharapkan dapat mempengaruhi investasi, karena dana investasi dan dana khusus tersebut bertujuan untuk menambah aset tetap negara guna meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal pada Provinsi Aceh tahun 2016-2020?
2. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal pada Provinsi Aceh tahun 2016-2020?
3. Apakah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pada Provinsi Aceh tahun 2016-2020?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus secara parsial terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2016-2020.



METODE PENELITIAN

Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh. Selain itu, sumber data yang dicakup dalam penelitian ini berupa Dana Alokasi Umum dan Khusus yang diperoleh dari APBA di Aceh periode 2016-2020. Dalam hal ini data merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari APBA Aceh yang tersedia pada portal atau website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu <http://djpk.kemenkue.go.id>.

Alat Analisis

Untuk mengetahui pengaruh Dana Distribusi Umum dan Dana Distribusi Khusus terhadap belanja modal pemerintah Aceh, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan rumus berikut.:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

X₁ = Dana alokasi umum

X₂ = Dana alokasi khusus

b₁ dan b₂ = Koefisien variabel independent

e = *Error term* (Faktor yang tidak di observasi)

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi normal dengan menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05. Hasil uji normalitas data adalah Asymp. Hasil ini melebihi tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05 atau 5%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa uji normalitas dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas

Model tidak memiliki multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas untuk masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas; Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Dana Alokasi Umum	,413	8,060
Dana Alokasi Khusus	,413	8,060

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2022)

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa toleransi untuk variabel total lebih besar dari 0,10. Semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10,00. Oleh karena



itu, mengacu pada dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolinearitas di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas untuk salah satu variabel tersebut.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Persamaan regresi berganda memerlukan pengujian apakah varians dari residual satu pengamatan sama dengan varians dari pengamatan lain. Persamaan regresi yang baik tanpa adanya heteroskedastisitas. Analisis pengujian ini dengan SPSS dengan scatterplot. Output gambar scatterplot yang dihasilkan menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah sumbu y dan tidak memiliki pola yang teratur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas di atas tidak memiliki heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Hal ini didasarkan pada acuan bahwa jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik berdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil rinci regresi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan program

SPSS (Statistical Product and Service Solution) 22.0 for Windows Evolution Version ditampilkan. Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Nama Variabel	β	Standar Error	thitung	ttabel	Sig
Konstanta (a)	2,311	1,135	2,036	2,571	0,053
Dana alokasi umum (X ₁)	0,124	0,024	5,167	2,571	0,000
Dana alokasi khusus (X ₂)	0,227	0,054	4,204	2,571	0,000

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,311 + 0,124 (X_1) + 0,227 (X_2)$$

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap belanja langsung berdasarkan korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tabel Model Summary

R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the estimate	Keterangan
0,531	0,282	0,208	597456,948	Korelasi Sedang

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 dijelaskan bahwa Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,531 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sebesar 53,1%. Artinya variabel dependen memiliki derajat hubungan yang berkategori sedang dengan variabel independen, karena nilai R sebesar 71,80% pengaruh dijelaskan oleh variabel lain di luar daripada yang menjadi variabel penelitian ini.



Hasil Pengujian Hipotesis Uji Secara Simultan

Hasil pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 22 pada hasil uji secara simultan diperoleh nilai koefisien konstan β_1 (0.124) dan β_2 (0.227), yang berarti berarti nilai koefisien β_1 dan $\beta_2 \neq 0$, sedangkan untuk nilai probabilitas F (0,007). Berdasarkan hipotesis H_0 yang diajukan sebelumnya, yang mengatakan bahwa jika $\beta_1 = \beta_2 = 0$ artinya variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara serempak terhadap variabel belanja modal pada Provinsi Aceh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_{01}) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_{a1}) diterima, karena $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$. Artinya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Aceh selama periode 2016-2020.

Uji Secara Parsial

Hasil pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 22 pada hasil uji secara parsial diperoleh :

H2 : diketahui nilai koefisien regresi variabel dana alokasi umum (β_1) sebesar 0.124, yang berarti berarti $\beta_1 \neq 0$, sedangkan untuk nilai probabilitas t adalah sebesar 0,000 dapat diartikan lebih kecil dari nilai kritis ($\alpha < 0,05$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_{02}) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_{a2}) diterima. Artinya bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi Aceh selama periode 2016-2020.

H3 : diketahui nilai koefisien regresi variabel dana alokasi umum (β_2) sebesar 0.227, yang berarti berarti $\beta_2 \neq 0$, sedangkan untuk nilai probabilitas t adalah sebesar 0,000 dapat diartikan lebih kecil dari nilai kritis ($\alpha < 0,05$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_{03}) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_{a3}) diterima. Artinya bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi Aceh selama periode 2016-2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan temuan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa: Dana Alokasi Umum akan berdampak parsial (positif) dan signifikan terhadap belanja modal di Aceh dari tahun 2016 hingga 2020. Dana Alokasi Khusus akan berdampak secara parsial (positif) dan signifikan terhadap penanaman modal di Aceh dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut, yaitu: Penelitian ini hanya dilakukan di Provinsi Aceh, dilakukan sesuai topik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa faktor baru lainnya yang diyakini dapat mempengaruhi belanja modal, seperti: B. Pendapatan Asli Daerah. Penyelidikan lebih lanjut membutuhkan waktu yang lebih lama agar hasilnya dapat menjelaskan kondisi dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2020). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
Ardhani, Pungky. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Semarang: Universitas Diponegoro.



- Astuti dan Joko (2015). *Kemandirian Daerah: Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis*, Jurnal Manajemen Usahawan, Nomor 03 Th XXXV Maret 2015, Lembaga Management FE-UI, Jakarta.
- Akbar, Taufik. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Darise, Nurlan, (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Darwanto. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2020.
- Halim, (2018). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Keputusan Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang *Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011*.
- Kristanto, Septian Bayu (2013). *Pengaruh Uk uran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern*. Jurnal Akuntansi UKRIDA, Volume 9, No.1.
- Nengsih, R., Sufitrayati, S., Maksalmina, M., Fitria, F., & Maulida, Z. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Aceh. In Prosiding Seminar Nasional USM (Vol. 3, No. 1, pp. 574-582).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang *Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Syarifin dan Jubaidah (2015). *Analisa Dana Alokasi Khusus Dalam Peningkatan Kemampuan Daerah*. Jurnal ISSN. Vo13 No] :17
- Tuasikal, Askam (2008). *Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Voll no 2. Juli 2008: 142-155.
- Zainuddin, Z., & Batubara, M. A. R. (2020). Dampak Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Serambi Akademica, 8(8), 1311-1319.
- Zainuddin, Z., Maryam, M., Hamdiah, C., Bakri, M., & Surya, J. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh. Jurnal Serambi Akademica, 10(3), 207-216.